

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Inflasi adalah salah satu indikator ekonomi yang sangat penting dan strategis sehingga harus dikendalikan melalui berbagai upaya atau kegiatan secara terencana, bersinergi dan komprehensif. Tingkat inflasi yang tinggi dan tidak stabil menimbulkan dampak negatif terhadap kondisi sosial ekonomi, mengurangi pendapatan riil, dan mengakibatkan penurunan standar hidup masyarakat serta berpotensi meningkatkan kemiskinan. Untuk itu perlu diambil langkah pengendalian inflasi dan menekan laju inflasi dengan dilakukan langkah-langkah strategis melalui kerjasama kelembagaan daerah dalam upaya mengendalikan inflasi. Di Kabupaten Lombok Utara inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Beberapa hal yang menjadi perhatian bagi TPID di triwulan I yaitu menjaga ketersediaan stok dan stabilitas harga, barang-barang utama kebutuhan pokok, pentingnya menjaga stabilitas harga ditengah menurunnya kemampuan daya beli masyarakat akibat covid-19. Pola pergerakan inflasi banyak dipengaruhi oleh faktor guncangan di sisi pasokan (supply side shock). Terjadinya bencana alam dan atau musim hujan yang berkepanjangan rentan menjadi pemicu meningkatnya harga berbagai kebutuhan pokok. Disamping itu, kebijakan pemerintah strategi di bidang harga seperti Bahan Bakar Minyak (BBM), Tarif Dasar Listrik (TDL), dan cukai rokok cenderung diikuti pergerakan inflasi yang lebih besar di daerah, sehingga perlu adanya pengendalian dan koordinasi dengan SKPD. Kabupaten Lombok Utara tidak termasuk Kabupaten yang menghitung inflasi hanya dua Daerah yaitu Kota Bima dan Kota Mataram, tetapi berdasarkan Laporan Perkembangan harga kebutuhan pangan dan terjadi kenaikan (Inflasi) pada komodite – komodite tertentu dan Laporan Perkembangan kondisi cadangan pangan masyarakat Kabupaten Lombok Utara triwulan I Tahun 2021 • Kebutuhan pangan minggu ke I (satu) pada bulan Januari Tahun 2021 di pasar Tanjung. a. Daging Sapi b. Bawang Merah c. Kacang Hijau • Kebutuhan pangan minggu III (Tiga) bulan Februari Tahun 2021 di Pasar Tanjung. a. Minyak goreng bimoli 1 Ltr b. Jagung c. Cabe Merah Besar Biasa d. Cabe Rawit e. Buncis f. Bawang Merah g. Bawang Putih h. Kacang Tanah • Kebutuhan Pangan pada minggu ke IV (Empat) pada Bulan Maret Tahun 2021 di Pasar Tanjung a. Telur ayam Broiler isi 30 Butir b. Cabe Rawit c. Bawang Merah d. Bawang Putih e. Kacang Tanah f. Kacang Hijau

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Mencermati terjadinya kenaikan harga – harga kebutuhan pokok (Inflasi) a. Kenaikan yang terjadi di Volatile Food (Komoditas Pangan) di perkirakan akan mengalami kenaikan seiring dengan faktor musiman adanya COVID-19 yang memicu tingkat konsumsi yang lebih tinggi. b. Komponen administered price (harga komoditas yang diatur pemerintah) juga diperkirakan akan mengalami kenaikan secara bulanan pada periode mendatang. Permintaan yang tinggi akan transportasi untuk mendukung kegiatan arus mudik maupun arus balik selama lebaran akan menyebabkan adanya kenaikan harga.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Untuk menjaga stabilitas harga terutama untuk komoditas volatile Food di Kabupaten Lombok Utara, TPID Kabupaten Lombok Utara telah melakukan beberapa langkah yaitu: 1. Dilakukan koordinasi serta peningkatan kerjasama dengan daerah/wilayah pengasialan komoditas pangan

serta melalui pertukaran produk agar ketersediaan stok terjamin dimasing-masing daerah/wilayah. 2. Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Lombok Utara (Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian) melakukan/pemantauan perkembangan harga pangan kepasar-pasar tradisional maupun sidak ke distributor-distributor untuk menjalin ketersediaan pasokan pangan dalam menjaga stabilitas harga. 3. Telah dilakukan koordinasi antara tim pengendalian inflasi daerah dalam hal ini Dinas koperasi, Perindustriandan perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian serta Satgas Pangan (Polres Lombok Utara) dengan Hiswana Migas terkait data penyaluaran gas elpiji 3 kg bersubsidi.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

a. Menjaga ketersediaan stok dan stabilitas harga barang-barang kebutuhan pokok masyarakat b. Pentingnya menjaga stabilitas harga ditengah menurunnya kemampuan daya beli masyarakat c. Dari kegiatan TPID ini harus ada penguatan Pemerintah Daerah d. Proaktif mendorong ekonomi yang tumbuh makin produktif e. Adanya pemantauan, perbaikan dan pengamanan pasokan f. Perlunya luas tanam untuk cabai dan Holtikultural lainnya g. Mensinkronkan program kerja masing-masing dinas yang terkait pengendalian inflasi baik secara jangka menengah maupun jangka panjang

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Kegiatan TPID ini diharuskan lebih banyak dilakukan pelaksanaan operasi pasar/pasar murah sehingga kenaikan harga kebutuhan pokok bias ditekan. 2. Penguatan produksi pangan terus diperkuat melalui penggunaan bibit unggul, penataan kalender tanam, hingga pemanfaatan teknologi pertanian terkini 3. Upaya perbaikan produksi ini secara efektif mampu meningkatkan produktivitas pertanian 4. Perlu Inovasi-inovasi yang terkait untuk pengendalian harga 5. Kerjasama dan koordinasi secara sinergis yang dilakukan secara lintas sektor/instansi.